

# Geger Komputerisasi STNK/BPKB

DENGAN segala hormat kita layak berterima kasih kepada beberapa anggota DPR dan sejumlah tokoh lain, yang mengimbau pemerintah agar meninjau ulang keputusan kenaikan biaya komputerisasi surat-surat kendaraan bermotor. Tentu saja imbauan itu sendiri tidak menjamin akan mengubah keputusan. Bahkan bila imbauan itu dikabulkan, belum berarti kita akan terbebas dari kasus-kasus yang persis sama di waktu dan bentuk lain.

## Apa yang aneh?

Beberapa hal yang penting dari kasus itu kurang mendapat sorotan komentator dan liputan media massa. Sorotan bertubi-tubi dipusatkan pada masalah "kesewenang-wenangan" pemerintah dan "pelecehan" wibawa dan wewenang DPR. Akibatnya, kita mendapatkan kesan seakan-akan hal seperti itu merupakan peristiwa ganjil yang langka. Bukan praktek sehari-hari yang dinormalkan. Bukankah justru imbauan DPR itu yang menarik karena langkanya?

Soal lain yang menarik diperhatikan ialah kehalusan budi bahasa para anggota DPR itu. Walau pun merasa sudah "dilecehkan" oleh pemerintah, mereka hanya mengimbau peninjauan ulang, penundaan atau pembatalan keputusan itu. Bayangkan seandainya pemerintah yang dilecehkan DPR sejauh itu.

Bayangkan, betapa indahnya dunia ini seandainya ada pemerintahan sebuah negara yang berbudi-bahasa sehalus DPR kita dalam berpolitik.

Kehalusan budi-bahasa DPR kita sudah sangat terkenal di dunia. Mereka tidak pernah berinisiatif dalam perumusan

perundang-undangan, walau inisiatif begitu diamanatkan UUD 1945. Mereka selalu menyalah dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk merumuskan bahan perundang-undangan. Dalam sejarahnya DPR tak pernah menolak ratusan rancangan perundangan yang diajukan pemerintah.

Tentu saja kehalusan budi-bahasa DPR ini bukanlah produk "budaya Timur" atau "kepribadian nasional". Istilah "budaya" sudah terlalu sering diperkosa dan diperalat politik untuk memalsukan realita dan membungkam perbincangan tentang sebuah masalah.

Bila sebuah masalah sudah dibilang sebagai "budaya" maka seakan-akan masalah itu tak dapat dipertanyakan atau digugat. Seakan-akan kebudayaan adalah suatu misteri yang tak terjangkau pisau analisa sosial-historis atau bebas hukum.

Memahami posisi dan sejarah DPR yang maha jinak itu, kita layak kaget dan berterima kasih atas komentar kritis beberapa anggotanya. Tapi ini sekaligus membawa kita ke persoalan yang berikut, yakni masalah terbatasnya daya-imbau mereka. Betapa berbeda bila ada "imbau" dari pejabat pemerintahan.

## Legalitas dan stabilitas

Berbagai kritik terhadap keputusan pemerintah itu didasarkan atas pertimbangan "legalitas" formal dan "stabilitas" ekonomi-politik. Dengan kata lain, berbagai kritik itu bukan saja masih dalam batas-batas politik-ideologi yang diresmikan, tapi merupakan pendukung tata-politik dan ideologi itu sendiri.

Kritik legalistik menyesalkan tindakan pemerintah yang

membuat keputusan tanpa melibatkan DPR sebagaimana dituntut konstitusi. Implikasinya, bila DPR sudah dilibatkan, maka keputusan itu sah-sah saja karena proses legalitas yang resmi itu dianggap konstitusional. Kritik stabilitas ingin memberikan peringatan kepada pemerintah akan potensi kemarahan rakyat bila keputusan itu dipaksakan juga. Bila ini terjadi maka stabilitas kekuasaan negara (termasuk pemerintah dan DPR) dan seluruh kepentingan aparatnya bisa terancam.

Mungkin di antara kita ada yang bisa "memahami" pemerintah atas tindakannya melecehkan DPR dan prosedur legal yang diresmikan pemerintah itu sendiri. Bukankah selama se-perempat abad ini DPR tidak pernah mempersulit apalagi menolak apa yang sudah dirancang oleh pemerintah? Bukankah selama ini DPR selalu menunjukkan dukungan, kesetiaan mesra dan "pengertian penuh" pada kemauan pemerintah? Manusia "normal" yang terbiasa dalam hubungan kerja demikian akan merasa bahwa konsultasi dengan DPR hanya basa-basi ritual yang membuang-buang waktu dan tenaga.

Selama ini DPR tidak pernah "mengajar" pemerintah untuk menghargai lembaga legislatif itu. Ini masuk akal dan tidak aneh. Kini mendadak beberapa anggota DPR meminta penghargaan selayaknya. Ini baru "aneh!"

Bila peraturan tentang surat kendaraan bermotor itu sudah dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah, apakah konsultasi dengan DPR bakal

## Ariel Heryanto

mengakibatkan banyak perubahan substansinya? Bukankah mayoritas anggota DPR terdiri dari anggota partai pemerintah? Anggota dari partai lain telah dilitsus oleh pemerintah bukan oleh pengusaha atau pemilik kendaraan-bermotor. Dari mana sih datangnya gaji para anggota DPR?

Perdebatan seru perihal keputusan pemerintah itu juga menunjukkan satu hal lain kepada kita, yakni elitisme kehidupan berbangsa-bernegara kita. Keputusan itu mendapat peluang dan keabsahan untuk diperdebatkan hanya gara-gara ada tokoh elit yang berminat memperdebatkannya. Dengan cepat dan mudah para komentator elit ini tampil sebagai pahlawan bagi masyarakat luas. Seandainya pahlawan ini berhasil menjinakkan keputusan pemerintah, masyarakat masih tidak beranjak dari kedudukan sebagai konsumen pasif, penadah nasib baik yang menetes dari kemurahan hati kaum elit bangsanya.

Dalam skala dan bentuk yang beraneka ragam, peraturan seperti komputerisasi STNK atau KTP merupakan menu sehari-hari bangsa kita. Di berbagai desa hingga kelurahan ada berbagai kewajiban yang menuntut pengorbanan rakyat tanpa perdebatan. Ada berbagai mekanisme orang mengembangkan usaha dagangnya tidak dengan berproduksi, tapi dengan menyusup masuk birokrasi negara. Biasanya tidak terjadi perdebatan. Rakyat kita patuh.

Kasus seperti itu baru menjadi gempar bila ada "jempol kaki gajah" di pusat ibu kota yang terinjak kaki "gajah" lain. Keti-

ka petani cengek diperas pabrik rokok dunia ini terasa tenang dan damai. Tapi ketika BPPC ikut ambil bagian, muncullah kegemparan.

Ini bukan berarti kontroversi antargajah itu harus dilarang. Ini hanya mengingatkan para semut supaya tidak usah berilusi yang muluk-muluk. Sesudah kasus komputerisasi STNK atau KTP, mungkin akan muncul lagi sejumlah kewajiban baru. Mungkin kasus-kasus baru itu akan diikuti kontroversi di antara kaum elit. Mungkin juga tidak.

Terpusatnya perhatian khilayak pada aspek legal dan aspek finansial dalam kasus komputerisasi STNK/BPKB, mengorbankan perhatian kita pada akar masalah yang lebih mendasar. Maka kita hanya berulang-ulang memperdebatkan kasus demi kasus. Bukan sumber pokok yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus tersebut.

Hal itu tampak lagi pada kecemasan sebagian pihak atas rencana komputerisasi KTP. Yang dipersoalkan berapa besar kenaikan biaya yang baru. Atau, siapa pihak swasta yang mengelolanya. Seakan-akan pihak swasta yang satu lebih baik daripada yang lain. Komputerisasi itu sendiri dianggap sebagai "tuntutan teknologi" yang wajar. Bukan sebagai lahan persaingan antarpengusaha yang membuahkan rezeki berlimpah. Atau, sebagai peningkatan kecanggihan sistem pengawasan dan pengendalian gerak hidup warga bangsa ini oleh aparat Negara.

**Daya kritik terhadap negara**  
Apakah karena desakan

kritik masyarakat, keputusan pemerintah itu akan dibatalkan, ditunda atau bahkan dicabut? Tentu saja sulit dipastikan. Tapi kita pasti belum melupakan kasus-kasus RUU perzinahan (1993) atau UU Lalu Lintas (1992). Karena kritik masyarakat, yang pertama kini telah direvisi. Sedang yang kedua telah ditunda.

Negara kita bukannya negara yang lemah dan bisa selalu

nguntungkan, bila tekanan meluas dari rakyat masih dalam bentuk dan isi yang menghormati batas-batas politik-ideologi yang diresmikan pemerintah. Juga bila apa yang menuntut bukan bagian-bagian mendasar dari tata-sosial itu sendiri. Tapi soal-soal yang relatif ringan seperti legalitas formal, atau tawar-menawar jumlah biaya administrasi negara.

Dalam skala dan bentuk yang beraneka ragam, peraturan seperti komputerisasi STNK atau KTP merupakan menu sehari-hari bangsa kita. Di berbagai desa hingga kelurahan ada berbagai kewajiban yang menuntut pengorbanan rakyat tanpa perdebatan. Ada berbagai mekanisme orang mengembangkan usaha dagangnya tidak dengan berproduksi, tapi dengan menyusup masuk birokrasi negara. Biasanya tidak terjadi perdebatan. Kasus seperti itu baru menjadi gempar bila ada jempol kaki gajah di pusat ibukota yang terinjak kaki gajah lain.

didikte. Tapi juga bukan negara yang kekuatannya tanpa batas. Kekuatan negara ini sedikit banyak ditentukan oleh kerjasama baik dari masyarakat yang pada hakikatnya sudah sangat patuh. Protes masyarakat terbukti sesekali manjur. Pemerintah cukup cerdas mempertahankan stabilitas *status-quo* dan kepentingan jangka-panjangnya dengan mengalah.

Tindakan mengalah itu me-

Yang menjadi pertanyaan kita ialah, masih berapa lama lagi tawar-menawar dengan protes masyarakat dapat dipertahankan dalam batas-batas yang aman itu. Sebab, Negara juga harus menghadapi desakan semakin kuat dari logika keserakahan kapitalisme. \*\*\*

**\*) Ariel Heryanto, staf pengajar Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga**